



PENETAPAN

Nomor :0177/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksakan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan peneta pandalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Arifuddin bin Lamallu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lappa Awo Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan anak Pemohon serta telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan nyabertanggal 2 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor :0177/Pdt.P/2017/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Dare Ajue tanggal 01 Juli 1972 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7312060107720023 sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng tertanggal 15 September 2012
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama **Yulianti binti Arifuddin** lahir pada tanggal 9 September 2001 (15 tahun 7 bulan) di Lattie, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 7312-LT-25072016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng tertanggal 31 Agustus 2016, Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama, **Husaini bin Tanrebba**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karenacalonmempelaiperempuanmasihdibawahumur, sementara keluarga Pemohon telah terlanjur terima lamarannya calon mempelai laki-laki bernama Husaini bin Tanrebba umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit kain, bertempat tinggal di Paddemmeng Padang Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, oleh karena karena itu, Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan dimaksud.
4. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia tela bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama Husaini bin Tanrebba.
5. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak adahubungan saudara sesusuan,sehingga tidak terdapat halanga untuk menjadi pasangan suami isteri.
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B.148/Kua.21.20.01/Pw.01/04/2017 tanggal 27 April 2017 sehingga Pemohon mengajukan permohonann dispenasi kawin kepada Pengadilan Agama Watan soppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena persiapan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.
8. Bahwa berdasarkanalasan-alasantersebut serta bukti-bukti yag akan diajukan, maka Pemohon dengan hormat kepadaBapakKetuaPengadilan Agama WatansoppengCqmajelis hakim yang memeriksadanmengadiliperkarainiberkenanmenjatuhkanputusan :

Primer :

1. Mengabulkanpermohonanpemohon
2. Menetapkanmemberikandispensasikawinkepada anakPemohon (**Yulianti binti Arifuddin**) untuk menikah dengan laki-laki bernama (**Husaini bin Tanrebba**).
- 3.MembebankankepadaPemohonuntuk membayar biaya perkara sesuaihukum yang berlaku

Hal 2dari6halPenetapanNomor 0177 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan bersama anak Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim, telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap mempertahankan pendapatnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetappada permohonannya.

Bahwa Pemohon, telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama **Yulianti binti Arifuddin**, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang.

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan di depan Majelis bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Husaini bin Tanreba telah melaksanakan pernikahannya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 di Lappa Awo, dinikahkan oleh imam kampung Latie yang bernama H. Latakkaro, dengan wali nikah adalah Arifuddin (Pemohon sendiri), saksi-saksi adalah Amri dan Upi dengan mahar 11 ringgit yang dinilai sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut di akui oleh calon suami anak Pemohon, bahwa benar telah menikah pada tanggal 19 Mei 2017, dan akan diadakan pesta pernikahan pada tanggal 20 Juni 2017.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya pengadilannya menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah teruraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan alibi permohonan menyatakan bahwa ia akan menikah

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 0177 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hkan anak perempuan yang bernama Yulianti binti Arifuddin, karena usianya baru (15 tahun, 7 bulan) dan sudah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Husaini bin Tanrebbba, namun maksud tersebut tidak diizinkan, sehingga bermohon ke Pengadilan Agama untuk diberidispensasikan Makadengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan telah menikahkan anaknya yang bernama Yulianti binti Arifuddin dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Husaini bin Tanrebbba pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 di Lappa Awo yang menikahkan adalah imam kampung Lati'e yang bernama H. Latakkaro, dengan wali nikah adalah Arifuddin, Pemohon sendiri dan saksi saksi adalah Amri dan Upi dengan mahar berupa uang 11 Ringgit yang dinilai sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, keterangan Pemohon diakui oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi nikah dapat diberikan apabila belum ditentukan waktu pernikahannya tersebut,

Menimbang bahwa ternyata, anak perempuan Pemohon (calon mempelai perempuan) serta calon mempelai laki-laki menyatakan telah dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, serta calon suami anak Pemohon, bahwa pernikahan telah dilaksanakan pada hari jumat, tanggal 19 Mei 2017, anak Pemohon telah dinikahkan dengan Laki-laki yang bernama Husaini bin Tanrebbba, maka Pengadilan tidak dapat lagi memberikan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon tersebut, oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubah kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangansertahukum syar'i yang berlakudan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 0177 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah yang dibacakan pada hari itu jugadalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Hj Asriah dan Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Musdhalipah S.H sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Hj Asriah Dra. Hj. A. Djohar

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Musdhalipah S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00.</u>

Jumlah Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 0177 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Hal 6 dari 6 | Penetapan Nomor 0177 /Pdt.P/2017/PA.Wsp